

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR

TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026

**RENCANA KERJA
TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH PESISIR SELATAN

Dibuat pada tanggal, Februari 2026

KATA PENGANTAR

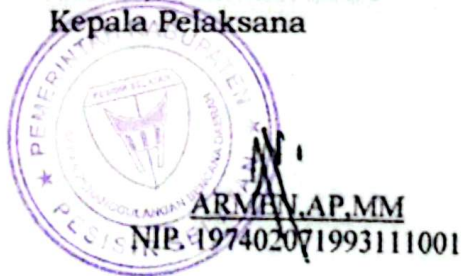
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Urusan BPBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Masih disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan- kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Renja ini. Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Renja ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor BPBD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Februari 2026
Kepala Pelaksana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	28
.	
BAB V PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel TC.29	: Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	30
Tabel TC.30	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	46
Tabel TC. 31	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.....	63
Tabel TC. 32	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan...	86
Tabel TC. 33	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Maju 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.....	105
Tabel TC. 27	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang penanggulangan bencana diperlukan kehadirannya untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BPBD yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka disusunlah Renja BPBD tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ;
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai :

- a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2026.
- c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- d. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
- e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini adalah untuk:

- a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- b. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.

- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2026 program/kegiatan/sub kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Tahun 2026 BPBD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan program sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua puluh Dua) sub kegiatan dengan realisasi capaian program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Dari penjelasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 sebanyak 2 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan 22 sub kegiatan :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Sesuai dengan Renstra BPBD 2025 – 2029, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan meliputi sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan kemampuan dan kelembagaan di daerah rawan bencana ;
2. Persentase penanganan bencana ; dan
3. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana ;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran masuk kategori sedang, dengan indikator sasaran Indeks. Tidak tercapainya sasaran strategis dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kemampuan dan kelembagaan di daerah rawan bencana yang telah ditetapkan sebesar 100% dikarenakan beberapa faktor diantaranya jangkauan luas dari cakupan wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga diharapkan dibentuknya posko penanggulangan di wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kebencanaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sampai tahun anggaran 2026 urusan kebencanaan hanya sebagai fungsi urusan penunjang. Namun dari sisi kelembagaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selata pada awal Tahun 2025 secara definitif mengalami perubahan dan peningkatan dari klasifikasi B (setingkat eselon III) menjadi klasifikasi A (setingkat eselon II).

Dengan urusan kebencanaan hanya sebagai fungsi urusan penunjang mengakibatkan urusan kebencanaan belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) urusan kebencanaan tidak maksimal dan masih banyak yang belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan tidak terpenuhinya SPM mengakibatkan penanggulangan bencana tidak maksimal.

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat mempengaruhi dalam pencapaian target dan pelayanan. Kejadian bencana tidak dapat diprediksi dan penanganan bencana tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan penanganannya.

Penanggulangan bencana alam meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penanggulangan bencana saat ini masih dominan untuk penanganan bencana saja, sedangkan untuk pra bencana dan pasca bencana belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kondisi ini mengakibatkan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Penanggulangan bencana tidak hanya bisa dilaksanakan oleh hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi harus melibatkan stake holder terkait baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama ini belum maksimal dan tidak tuntas. Ini disebabkan oleh karena penanggulangan bencana tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tetapi secara kewenangan ada di OPD terkait lainnya seperti bantuan makanan, sandang dan hunian untuk pengungsi merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perbaikan/rehab rumah akibat bencana alam ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dari uraian dan penjelasan diatas, yang menjadi point yang sangat penting isu – isu strategi dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terencana, terkoordinir, terpadu, menyeluruh dan tidak tuntas.
2. Anggaran penanggulangan bencana tidak cukup dan tidak memadai.
3. Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat belum dilakukan secara maksimal.

1.2 Review Terhadap Rancangan RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan penganggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2026 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaah terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaah tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu kepada Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPB dan Visi Penanggulangan Bencana Nasional dalam mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana. Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan penanggulangan bencana pada saat sebelum terjadi bencana adalah :

- a. Membuat Kajian Resiko Bencana ;
- b. Membuat Rencana Penanggulangan Bencana ;
- c. Membuat Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ;
- d. Membuat Rencana Aksi Pemulihan Bencana ;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2025	2026
Meningkatkan administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	• Nilai AKIP Perangkat Daerah	77	78
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	• Nilai Kematangan Inovasi PD	91%	91
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	12	12
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	6	6
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5	5

3.3 Program dan Kegiatan

rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : 2 program
2. Kegiatan : 10 kegiatan
3. Sub Kegiatan : 22 sub kegiatan

Dengan total kebutuhan/pagu indikatif rencana kerja BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebesar **RP. 5.103.106.393 ,- (Lima Milyar seratus tiga Juta seratus enam ribu Tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah)**

Titik berat program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah untuk pemenuhan SPM urusan kebencanaan. Sampai saat ini SPM urusan kebencanaan masih belum dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Untuk pemenuhan dan pelaksanaan SPM urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan memadai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Untuk nomenklatur program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun anggaran 2025 telah melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan, pemerintah daerah wajib memenuhi dan melaksanakan standar Pelayanan minimal (SPM). Sampai Kondisi saat ini, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi dan melaksanakan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk terlaksananya urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan SPM Urusan Kebencanaan secara komprehensif maka perlu mendapat perhatian serius dan khusus serta prioritas pada tahun anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah harus menyediakan alokasi anggaran penanggulangan bencana secara memadai. Selama ini anggaran yang dialokasi tidak memadai dan tidak mencukupi.
2. Alokasi anggaran penanggulangan bencana tidak hanya untuk penanganan bencana tetapi, juga untuk melaksanakan pembentukan Nagari/Desa Tangguh Bencana (DESTANA).Kejadian bencana alam tidak dapat diprediksi dan penanganan kejadian bencana tidak dapat ditunda, harus segera dilaksanakan.
3. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinir, terpadu, menyeluruh dan tuntas. Penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan belum menyeluruh dan tidak tuntas. Masih ada penanganan bencana yang tidak

dilaksanakan dan tidak tuntas. Ini disebabkan karena penanggulangan bencana tidak hanya bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 kami susun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2027.

Painan, Pebruari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD,



ARMEN AP,MM

NIP. 197402071993111001

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

[illegible]

Tahun	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kendali Awal RP-JMD (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Perangkat Profesi																Pencapaian Kinerja Program dan Perangkat Profesi	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kendali Akhir pada akhir periode = Rencana Penghasilan Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan	Persentase Ketersediaan barang milik daerah	100	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	323		
		1.05.01.01.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPBD	Sah. (Perset)	
		1.05.01.01.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPBD	Sah. (Perset)	
		1.05.01.2.07.0.006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	25	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5	49.830.250	5			
		1.05.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Pemangjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	323		
		1.05.01.2.08.0.3	Pengadaan jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPBD	Sah. (Perset)	
		1.05.01.2.08.0.2	Pengadaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENANGGULANGAN)	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	45	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	9	323		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkualitas baik (%)	100	72	336.452.459	72	336.452.459	72	336.452.459	72	336.452.459	72	336.452.459	72	336.452.459	72	336.452.459	72	323		
		1.05.01.2.09.0.1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAIRAH)	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	18	323		
		1.05.01.2.09.0.2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAIRAH)	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	18	276.452.459	18	276.452.459	18	276.452.459	18	276.452.459	18	276.452.459	18	276.452.459	18	276.452.459	18	323		
		1.05.01.2.09.0.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPBD	Sah. (Perset)	
		1.05.01.2.09.0.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	323		
		1.05.01.2.09.0.9	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPBD	Sah. (Perset)	

Tahun	Bencana	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kendali Awal RPJMD (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas														Kendali Kinerja untuk nilai penilaian Kinerja Penanggulangan Bencana	Penyakit Bencana Penanggulangan (Jumlah)	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Bencana Kontak/Operasi Terpadu Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pemadaman/pengendalian operasi/pengendalian/urutan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.02.15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebencanaan Pasca Bencana (LITTA PASMA) Bencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100		1.008.223.200		1.012.088.235	15	1.015.088.235	15	1.018.088.235	15	1.020.088.235	15	1.022.088.235	15	1.025.088.235	0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelamat/Wabah Penyakit/Wabah Penyakit																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen BK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditandatangani Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03.03	Penyerahan Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditentukan,Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	181.515	36.303	951.088.235	36.303	952.088.235	36.303	953.088.235	36.303	954.088.235	36.303	955.088.235	36.303	956.088.235			0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.03.04	Persyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	181.515	36.303	57.134.971	36.303	60.000.000	36.303	62.000.000	36.303	64.000.000	36.303	66.000.000	36.303	68.000.000	127.428	274.134.971	0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.04	Pemetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pemetaan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana	100		95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penyelamatan/Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.04.03	Pengujian Kemampuan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Ketenagakerjaan Bencana Daerah																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.04.02	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana																0000	Sekeloa	
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemantauan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan																0000	Sekeloa	

Tahun	Durasi	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kredit Awal RP, IMD (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Puncak														Kredit Akhir RP, IMD (Tahun 2025)		Tanggung Jawab Pemangku	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.05.03.2.04.0.0	Bimbingan Teknis Pemasangan	Jumlah Aparatur BPMD Kabupaten/Kota dan Unitas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian kebutuhan	75	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000			BPMD	Kab. Ponorogo		
		1.05.03.2.04.1.0	Koordinasi pemangku pemerintahan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan RSP melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan permasalahan	60	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	75	55.000.000	BPMD	Kab. Ponorogo		
							6.546.588.963		6.551.919.094	6.551.919.094	6.558.919.094		6.574.319.094		6.581.088.964		66.088.454.183						
Jumlah							6.546.588.963		6.551.919.094	6.551.919.094	6.558.919.094		6.574.319.094		6.581.088.964		66.088.454.183						

Tabel 2.7 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2026	Per Triwulan I Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	√	78	79	80	81		-			
	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	√	91	91	91	91					
3	Tingkat Penanganan Penanggulangan	-	√	100	100	100	100	-	-			
4	Persentase Nagari Tangguh Bencana	-	√	18	20	22	24		-			

Tabel TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kode	Rancangan Awal RKPD				Realisasi Kinerja				Realisasi Kinerja			
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	
1	3.27.00	BPRD				5.550.958.532	BPRD				5.550.958.532		
1	3.27.01	PROGRAM PENURJANG URURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		PERSYARAFAN KETERCAPAIAN PENURJANG URURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	5.794.381.976	PROGRAM PENURJANG URURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		PERSYARAFAN KETERCAPAIAN PENURJANG URURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	5.794.381.976		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perentase akurasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	31.587.533	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perentase akurasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	31.587.533		
	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	31.587.533	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	31.587.533		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	3.403.014.953	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	3.403.014.953		
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paiman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	3.161.486.953	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paiman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	3.161.486.953		
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Paiman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	241.528.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Paiman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	241.528.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100.800.000		
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paiman	Tersedianya Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	100.800.000	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paiman	Tersedianya Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	100.800.000		
	3.27.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Perentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	269.367.972	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Perentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	269.367.972		
	3.27.01.2.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paiman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4.223.057	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paiman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4.223.057		
	3.27.01.2.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paiman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.409.841	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paiman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.409.841		
	3.27.01.2.04.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paiman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.007.492	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paiman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.007.492		
	3.27.01.2.04.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paiman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	29.999.885	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paiman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	29.999.885		
	3.27.01.2.04.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Paiman	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Paiman	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-		
	3.27.01.2.04.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Paiman	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	173	4.108.000	Facilitas Kunjungan Tamu	Paiman	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	173	4.108.000		
	3.27.01.2.04.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paiman	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	139.651.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paiman	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	139.651.000		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paiman	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	22.916.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paiman	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	22.916.000		

No	Kode	Rencana Anggaran Pendapatan					Misi Analisis Kebijakan				
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikator (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikator (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Pemenuhan Pemerintahan Daerah (%)	100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Pemenuhan Pemerintahan Daerah (%)	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palman		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palman	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		
	Pengadaan Mebel	Palman		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			Pengadaan Mebel	Palman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Palman		Tersedianya Peralatan mesin Lainnya	20	49.519.980	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Palman	Tersedianya Peralatan mesin Lainnya	20	49.519.980
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	70.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	70.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penyelenggaraan Bersama)	Palman		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penyelenggaraan Bersama)	Palman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	70.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Palman		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Palman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik (%)	100	276.452.459	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik (%)	100	276.452.459
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palman		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	39.190.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palman		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	217.712.459	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	217.712.459
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palman		Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palman	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palman		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	10.550.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	10.550.000
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Serana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palman		Jumlah Serana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)			Pemeliharaan/Rehabilitasi Serana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palman	Jumlah Serana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)		

No	Kode	Rencana Awal RKPD					Realisasi Akhir RKPD				
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikatif (Rp.)	Realisasi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	3.27.02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Persentase Kajian Bencana Yang Dievaluasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	49,86	1.756.877.556	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Persentase Kajian Bencana Yang Dievaluasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	49,86	1.756.877.556		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana	100	250.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana	100	250.000.000		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	250.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	250.000.000		
		Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana 0 Secara tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	7.500	47.077.160	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana 0 Secara tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	7.500	47.077.160		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan	100	223.278.286	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan	100	223.278.286		
		Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	1	67.723.165	Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	1	67.723.165		
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2	-	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2	-		
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	7.500	38.394.721	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	7.500	38.394.721		
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20	-	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20	-		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	-	-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	-	-		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana RKPD yang Disetujui	1	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana RKPD yang Disetujui	1	100.000.000,00		

No	Kode	Bakosnas Area RKPD					Bakosnas Kota/Kabupaten					Catatan/Peringatan
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar/ Penguat Indikator (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar/ Penguat Indikator (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Gladh Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paiman	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladh Kesiapsiagaan	10	17.160.400	Gladh Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paiman	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladh Kesiapsiagaan	10	17.160.400	
		Penggunaan Kapasitas Komunitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Paiman	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki kelemahan dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2		Penggunaan Kapasitas Komunitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Paiman	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki kelemahan dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2		
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Paiman	Jumlah laporan laporan hasil pengendalian operasi (protokol) dengan Matriks Pelaporan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Paiman	Jumlah laporan laporan hasil pengendalian operasi (protokol) dengan Matriks Pelaporan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di	2		
		Penyediaan Pendidikan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paiman	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengujian Kebutuhan Pasca Bencana (ITU PASNA) Bencana Rehabilitasi Dan	2		Pendidikan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paiman	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengujian Kebutuhan Pasca Bencana (ITU PASNA) Bencana	2		
		Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paiman	Pemeriksaan Korban Bencana Yang Dirangsang	100	1.427.224.474	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paiman	Pemeriksaan Korban Bencana Yang Dirangsang	100	1.427.224.474	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Paiman	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	10		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Paiman	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	10		
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Paiman	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	2		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Paiman	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen	2		
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paiman	Jumlah korban yang berhasil Ditentukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	36.303	1.339.197.253	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paiman	Jumlah Korban yang berhasil Ditentukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	36.303	1.339.197.253	
		Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Paiman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2		Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Paiman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paiman	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	36.303	88.027.221	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paiman	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	36.303	88.027.221	

No	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Pemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana	100	88.694.904	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Pemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana	100	88.694.904	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	-	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	-	
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	-	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	-	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	-	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Painan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	-	
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	15	36.720.207	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Painan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	15	36.720.207	
		Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Painan	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan RSP melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	12	51.974.697	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Painan	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan RSP melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	12	51.974.697	
						5.550.958.532					5.550.958.532	

Tabel TC. 32
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN

	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	
1	2	3	4	5	22	12
	RPRD					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (%)	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	Kab. Pessel	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	Kab. Pessel	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	Kab. Pessel	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Painan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	Kab. Pessel	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Kab. Pessel	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Kab. Pessel	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Kab. Pessel	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Kab. Pessel	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	Kab. Pessel	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	175	Kab. Pessel	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	Kab. Pessel	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	Kab. Pessel	

	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Basaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	
1	2	3	4	5	22	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	Kab. Pessel	
	Pengadaan Mebel	Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	25	Kab. Pessel	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Painan	Tersediannya Peralatan mesin Lainnya	5	Kab. Pessel	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	Kab. Pessel	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(Badan Penanggulangan Bencana)	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	Kab. Pessel	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor,	12	Kab. Pessel	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik (%)	100	Kab. Pessel	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	Kab. Pessel	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	Kab. Pessel	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Painan	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	60	Kab. Pessel	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	Kab. Pessel	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Kab. Pessel	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Presentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100,00	Kab. Pessel	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana	100	Kab. Pessel	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5	Kab. Pessel	
	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana 1 (RADAN	Painan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana 0 Secara tatap Muka Kepada Penduduk	7.500	Kab. Pessel	

	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	
1	2	3	4	5	22	12
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan	100	Kab. Pessel	
	Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Bah/ Legal	2	Kab. Pessel	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Painan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2	Kab. Pessel	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2	Kab. Pessel	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20	Kab. Pessel	
	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Bencana	-	Kab. Pessel	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Painan	Jumlah Dokumen Rencana RKPBB yang Dilegalisasi	1	Kab. Pessel	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Painan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	175	Kab. Pessel	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Painan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	Kab. Pessel	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal	2	Kab. Pessel	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Painan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi	2	Kab. Pessel	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100	Kab. Pessel	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Painan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	10	Kab. Pessel	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen	2	Kab. Pessel	
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Painan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	36.303	Kab. Pessel	

	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	
1	2	3	4	5	22	12
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Pemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana	100	Kab. Pessel	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	Kab. Pessel	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Kab. Pessel	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Painan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Kab. Pessel	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Painan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Kab. Pessel	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Painan	Jumlah Dokumen Kerja sSama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	15	Kab. Pessel	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Painan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Hasil	-	Kab. Pessel	
	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Painan	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	12	Kab. Pessel	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2026, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan,

2026

BUPATI PESIR SELATAN

